

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI KOTA MEDAN**

Mas'ut¹⁾, Abdan Masrura²⁾

¹⁾Universitas Islam Sumatera Utara

Email: m.masut@yahoo.com

²⁾Universitas Islam Sumatera Utara

Email: masut@fe.uisu.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the application effect of accounting information system to accountability of local tax revenue in the regional tax and retribution management board of Medan City. A number of the sample or respondent is 30 employees of the Regional Tax and Retribution Management Board of Medan. The data is gained through questionnaires which are spread up among the respondents then processed by using SPSS program. Simple regression analysis is used to analyze and the result shows that the application of accounting information system (X) has given positive influence into the accountability of local tax revenue (Y). The coefficient of determination or R square figure amount to 75.4% and the remaining 24.6% is influenced by other variables which are not examined. Therefore, the Regional Tax and Retribution Management Board is supposed to maintain the application of accounting information system to increase the accountability of local tax revenue.

Keywords: *Accountability, Information, Tax Revenue, Management.*

I. PENDAHULUAN

Dalam dunia kerja kerap terjadi pemborosan waktu, hal ini tentu menjadi masalah. Maka jika terjadi di perusahaan, di organisasi atau badan usaha milik negara seperti di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tentu akan mengganggu sistem pelayanan pajak. Pemborosan waktu dapat dikatakan karena masih menggunakan sistem manual dalam perakuntansian dan administrasinya, atau memang boleh jadi sudah menggunakan sistem komputerisasi namun belum maksimal.

Padahal peranan sistem informasi akuntansi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan lagi. Semakin cepat pengelolaan data yang akan disajikan perusahaan akan semakin cepat memberikan informasi tentang perusahaan. Maka dengan dukungan sistem informasi akuntansi di suatu perusahaan akan menambah berbagai keunggulan

kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Dalam konteks otonomi daerah, sistem informasi akuntansi pemerintah daerah mengacu pada PP 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer, yang mampu menghubungkan dan menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), sehingga data di pemerintah daerah dapat terintegrasi dengan baik. Berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 sistem informasi akuntansi merupakan sistem akuntansi yang berbasis *akrual* yang dapat menyediakan informasi yang komprehensif bagi pemangku kepentingan.

Penerapan sistem informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan

pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Menurut Hall (2011:9) “Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang terdiri dari tiga sub sistem, yaitu *transaction processing sistem, general ledger/financial reporting sistem, management reporting sistem*”.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Fungsi sistem informasi akuntansi menurut Hall yang dialih bahasakan oleh Fitriyani (2007:12) adalah:

- a. Pekerjaan yang sifatnya berulang dapat diminimalisir.
- b. Sistem penyimpanan data menjadi lebih sistematis.
- c. Mengurangi tingkat kesalahan.
- d. Pekerjaan menjadi lebih mudah karena sistem informasi akuntansi sudah berjalan.

Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. SIA terdiri dari 3 subsistem yaitu:

- a. Sistem pemrosesan transaksi adalah sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis.
- b. Sistem buku besar/pelaporan keuangan adalah sistem yang menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba/rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak.
- c. Sistem pelaporan manajemen adalah sistem yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan pertanggungjawaban.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Menurut Mahmudi (2010) dan Mardiasmo (2009) akuntabilitas dapat

diartikan sebagai bentuk kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat atau pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam hal ini akuntabilitas publik menuntut pengelolaan lembaga-lembaga publik agar beroperasi dalam konteks *good governance*, yaitu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran.

Karena itu akuntabilitas publik merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya baik di daerah maupun di pusat. Dalam konteks otonomi daerah pengelolaan badan milik negara seperti Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak terlepas dari tuntutan akuntabilitas publik, yaitu terkait dengan pendapatan asli daerah.

Pada UU No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan pajak daerah merupakan suatu bentuk peran masyarakat maka harus ada suatu pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas pada proses administrasi dan dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah untuk kemakmuran rakyat semata.

Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan Daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah dengan fungsi meningkatkan objek atau subjek pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan potensi pendapatan daerah, meningkatkan peran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan pembayaran pajak retribusi daerah dan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memerlukan sistem informasi akuntansi agar meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah dapat tercapai sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Maka berdasarkan fenomena di atas penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui lebih lanjut bagaimana pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi (SIA) terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Penelitian yang dimaksud dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Medan. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan

informasi yang berguna bagi kalangan akademisi maupun praktisi serta pejabat yang berkiprah dalam lapangan ini. Setidaknya dapat memberikan pertimbangan dan evaluasi terkait dengan penerapan sistem informasi akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan atau organisasi.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian dan Lokasi

Penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak dan retribusi daerah di kota Medan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang dimaksud diselenggarakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, berlokasi di Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

Penentuan lokasi dan tempat penelitian tersebut berdasarkan pertimbangan aksesibilitas dalam pengumpulan data serta jarak tempuh yang memungkinkan peneliti dapat menjangkaunya secara mudah. Dengan demikian penelitian dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang tersedia dan dilaporkan dalam waktu yang relatif singkat.

2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah fenomena atau permasalahan penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel (Arikunto 2010:63). Dalam hal ini fokus dan objek yang akan diteliti berkenaan dengan responden yang menjalankan sistem sebagai variabel bebas (X), sedangkan bagian keuangan dan pajak sebagai variabel terikat (Y). Menurut Sugiyono (2012:59), “variabel suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Dengan demikian variabel dapat dikatakan sebagai suatu hal yang menjadi objek pengamatan penelitian atau sering pula dikatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti, dan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel.

Tabel 1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi variable	Indikator	Pengukuran	Skala
1.Sistem Informasi Akuntansi (X)	Sebagai kumpulan (integrasi) dari sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Susanto, 2008:72)	1. Pengumpulan data dan pengolahan data transaksi	– Akurat dan tepat – Kualitas laporan – Efektif dan Efisien	Ordinal
		2. Penyimpanan data transaksi	– Ketepatan – Keamanan – Kecepatan	Ordinal
		3. Pemberian Informasi	– Kemudahan – Kebenaran – Terpercaya	Ordinal
		4. Efisiensi Kerja	– Laporan – Waktu Kerja	Ordinal
2.Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah (Y)	Kewajiban untuk memberikan tanggungjawab untuk menyajikan/melaporkan informasi realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah kepada yang berwenang (Halim dalam Herawati (2012).	1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran	– Kepatuhan terhadap hukum – Menghindari Korupsi dan kolusi	Ordinal
		2. Akuntabilitas Proses	– Pelaksanaan pekerjaan – Pelayanan Publik	Ordinal
		3. Akuntabilitas Program	– Tujuan tercapai – Program yang optimal	Ordinal
		4. Akuntabilitas Kebijakan	– Pengambilan Keputusan – Peraturan	Ordinal
		5. Akuntabilitas Keuangan	– Laporan Keuangan – Penggunaan Dana – Pertanggung jawaban	

Sumber: Data yang Diolah

2.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2009:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari populasi tersebut kemudian peneliti mengambil sampel, dalam hal ini peneliti menggunakan *non probability* sampling yaitu, teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus atau sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2008:85) “sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Maka dalam penelitian ini sampelnya sebanyak 30 orang, yaitu melibatkan seluruh pupulasinya sehingga dikatakan “sampel jenuh”.

2.4 Data Collection and Analisis

Data diperoleh melalui penyebaran angket

kepada 30 orang pekerja di kantor pajak dan retribusi daerah di Kota Medan. Semua data diproses melalui pendekatan statistik dengan menggunakan SPSS. Karena itu analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:206), “statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Beberapa diantaranya yang dilakukan dalam analisis data ini sebagai berikut dibawah.

a) Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2011).

b) Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2011) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruksi. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode koefisien *Alpha Cronbach's*

c) Analisis Korelasi Pearson

Analisis Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya.

Tabel berikut adalah interpretasi koefisien korelasi. *Pearson Correlation* termasuk salah satu metode korelasi dalam SPSS dengan besar kecilnya koefisien korelasi: -1 0 $+1$. *Pearson Correlation* digunakan untuk data berskala interval atau rasio. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi

(Sugiyono, 2012: 257), sebagaimana terlihat dalam table berikut:

Tabel 2
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.0 – 0.199	Korelasi sangat lemah (tidak ada)
0.20 – 0.399	Korelasi lemah
0.40 – 0.599	Korelasi cukup
0.60 – 0.799	Korelasi kuat
0.80 – 1.000	Korelasi Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2013:250)

d) Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk menjamin kesahihan hasil regresi, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari model regresi tersebut tidak bias. Pada regresi linier sederhana ada dua asumsi yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas dan uji heteroskedasitas.

e) Uji Hipotesis.

Hipotesis Penelitian

- Ho: Sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah.
- H1: Sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh dengan akuntabilitas pendapatan pajakda erah

Hipotesis Statistik

- H: $\rho = 0$, sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah.
- H1: $\rho \neq 0$, sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah.

f) Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Rumus Koefisien determinasi dapat

ditunjukkan sebagai berikut, ($R^2 = \text{Adjusted R-Square} \times 100\%$).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci jenis-jenis pajak provinsi dan pajak kota tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pajak Hotel
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Air Permukaan	4. Pajak Reklame
5. Pajak Rokok	5. Pajak Penerangan Jalan
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	7. Pajak Parkir
	8. Pajak Air Tanah
	9. Pajak Sarang Burung Walet
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber: Kantor Pajak Kabupaten

Karena penelitian ini membahas tentang pajak daerah yang di kelola kabupaten/kota maka penelitian ini terfokus pada fenomena yang menjelaskan tentang pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota.

3.1 Analisis Korelasi Pearson

Tabel 4
Analisis Korelasi Pearson

		SIA	APPD
SIA	Pearson Correlation	1	.755**
	Sig. (2-tailed)	-	.004
	N	30	30
APPD	Pearson Correlation	.755**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	-
	N	30	30

3.2 Pengujian Asusmi Regresi

Tabel 5
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.85433495
Most Extreme Differences	Absolute	.142
	Positive	.142
	Negative	-.093
Test Statistic		.442
Asymp. Sig. (2-tailed)		.787 ^a

a. Test distribution is Normal.

3.3. Pengujian Heteroskedastisitas

Tabel 6
Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Std. Coef	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.084	3.173		2.863	.013
	SIA	.801	.126	.848	5.753	.000

a. Dependent Variable: RES2

3.4 Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 7
Pengujian Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Std. Coef	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.084	3.173		2.863	.013
	SIA	.801	.126	.848	5.753	.000

a. Dependent Variable: APPD (akuntabilitas pendapatan pajak daerah)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,084 + 0,801 X$$

3.5 Koefisien Determinasi

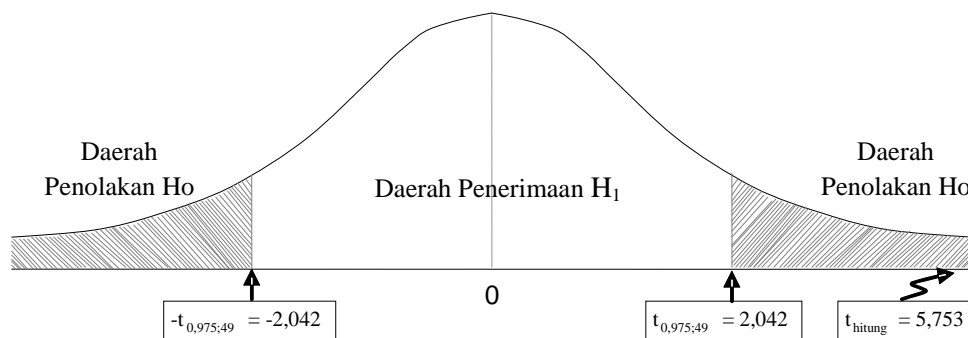
Tabel 8
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.802 ^a	.756	.691	.6127

a. Predictors: (Constant), SIA

Selanjutnya dapat dikemukakan dalam gambar berikut berkenaan dengan grafik yang menjelaskan kawasan atau daerah penerimaan hipotesis di satu sisi, dan daerah penolakan hipotesis di sisi lain yang disimbolkan dengan H_0 dan H_1 . Dalam hal ini H_0 merupakan simbol penolakan sedangkan H_1 merupakan simbol penerimaan.

Gambar 1
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0



Tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga pemerintahan terutama lembaga yang mengelola pendapatan asli daerah atau lembaga yang mengelola keuangan negara merupakan masalah yang mengemuka beberapa tahun terakhir ini terutama sejak otonomi daerah diberlakukan. Secara konsep, akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan.

Bahkan menurut Mardiasmo (2004:31), “akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah”. Lebih lanjut Mardiasmo (2004:31) mengatakan bahwa akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas publik yang seharusnya dibangun adalah akuntabilitas publik yang tidak hanya ditujukan secara internal (pemerintah atasan saja) tetapi juga ditujukan kepada para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat. Selain itu, mekanisme akuntabilitas publik juga tidak hanya ditujukan untuk mengukur kinerja seseorang, tetapi juga dapat memantau perilaku dari pejabat publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas publik, berbagai upaya berupa kebijakan, aturan, termasuk pengembangan sistem informasi akuntansi yang terarah dan sistematis. Menurut Susanto (2008:72) Sistem Informasi Akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan sub system baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi berdasarkan PP No. 65 tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai substansi usaha-usaha untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat meningkatkan akuntabilitas daerah serta transparansi melalui pembangunan sistem akuntansi keuangan daerah, diharapkan akuntabilitas pendapatan pajak daerah dapat tercapai dengan efektif dan efisien sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk dapat meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Penelitian ini didasarkan pada pertimbangan pemikiran seperti yang dipaparkan di atas. Dari hasil pengujian yang telah dibahas diketahui bahwa pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah dinyatakan dengan perhitungan korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang sangat erat/kuat antara sistem informasi akuntansi dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Arah hubungan yang positif ditunjukkan dengan tidak adanya tanda negatif pada angka perhitungan korelasi. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 75,6% menunjukkan besarnya pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 24,6% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi serta harus lebih transparannya laporan keuangan atau anggaran.

Sedangkan dalam uji hipotesis menggunakan uji t diperoleh nilai t_{hitung} adalah sebesar 5,753 lebih besar dari t_{tabel} (2,042), maka diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a , jadi hasil pengujian menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Oleh karena itu, terbukti bahwa koefisien regresi adalah signifikan atau dengan kata lain sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah.

Meskipun pengaruhnya tidak dominan, tetapi sistem informasi akuntansi dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Hal tersebut membuktikan teori yang dikemukakan oleh Nurani (2006) yang menerangkan bahwa akuntabilitas publik akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baru sesuai dengan paradigma *good governance*, dan juga pendapat Mardiasmo (2003) bahwa akuntansi keuangan daerah memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Penelitian ini juga membuktikan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Syafariani (2014) bahwa apabila penerapan sistem informasi akuntansi diterapkan dengan baik maka akuntabilitas pendapatan pajak daerah dinas pendapatan Kota Bandung akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Gala (2013) juga membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.

4. KESIMPULAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Hal ini didasarkan dari hasil perhitungan koefisien determinasi yaitu 75,6% menunjukkan besarnya pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Penerapan sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah berjalan dengan sangat baik, ini ditunjukkan oleh tanggapan responden yang mencapai angka 91,28%. Angka tersebut menunjukkan kriteria sangat baik, sehingga akuntabilitas pendapatan pajak daerah juga dapat berjalan dengan sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya disarankan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar dapat mempertahankan maupun

meningkatkan penerapan sistem informasi akuntansi yang sudah berjalan dengan sangat baik, sehingga pendapatan pajak daerah yang dibayar oleh wajib pajak dapat di pertanggungjawabkan. Diharapkan juga kepada peneliti selanjutnya supaya meneliti variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas pendapatan pajak daerah, seperti kinerja anggaran maupun peraturan-peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Rhineka Cipta. Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. YKPN. Yogyakarta.
- Bodnar et. Al. 2010. *Accounting Information System*. Prenticce Hall. USA.
- Ghozali Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hall, James. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kusrini. 2007. *Membangun SIA dengan Visual Basic & Microsoft SQL Server*. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN*, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- _____. 2016. *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Puspitawati dan Anggadini Dewi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sudjana. 2009. *Statistika*: Edisi ke-3. Tarsito. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Susanto, Azhar. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah. Nomor 65 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- _____. 2013. *Peraturan Menteri dalam Negeri. Nomor 64 Tentang Akuntansi Berbasis Akrual*.
- _____. 2014. *Undang-Undang Nomor. 23 Tentang Pemerintah Daerah*.